

**DANA DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI  
IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA JAMBANGAN, KECAMATAN  
BAWANG, KABUPATEN BATANG**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

**Muhammad Nafiudin**  
**NIM. 14230040**

Pembimbing:

**Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si.**  
**NIP. 19810428 200312 1 003**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515816 Fax. (0274)552230  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**Nomor : B.896/UIN.02/DD/PP.05.03/5/2018**

Tugas Akhir dengan Judul :

**DANA DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN:**  
**Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang,**  
**Kabupaten Batang**

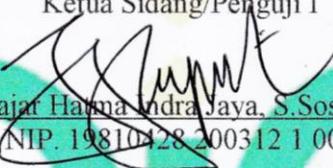
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Nafiudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 14230040  
Telah diuji pada : 7 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

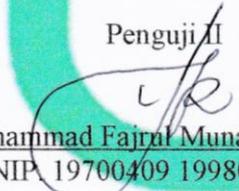
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

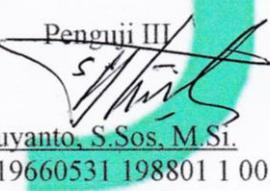
Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. Pajar Hatma Andra Saya, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19810428 200312 1 003

Penguji II

  
Muhammad Fajri Munawir, M.Ag.  
NIP. 19700409 199803 1 002

Penguji III

  
Suyanto, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19660531 198801 1 001

Yogyakarta, 15 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281 email: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Nafiudin  
NIM : 14230040  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul Skripsi : Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

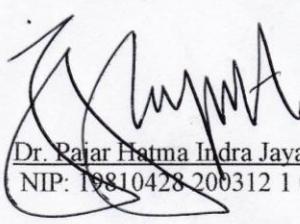
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

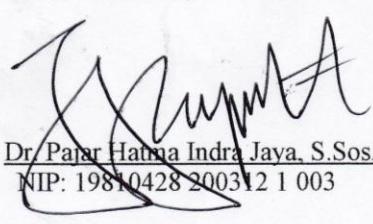
Yogyakarta, 26 April 2018

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Prodi PMI,

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si  
NIP: 19810428 200312 1 003

  
Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si  
NIP: 19810428 200312 1 003

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nafiudin

NIM : 14230040

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "*Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Maret 2018



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Begitu panjangnya perjalan hidupku, begitu banyaknya rintangan yang menghadang,  
itu semua tidak bisa aku lalui tanpa dukungan orang- orang yang selalu ada di dekatku.

Sesungguhnya karya tulis ini ku persembahkan kepada

.....

Ibu dan bapak tercinta, Rohmat dan Rohmi yang tak henti-hentinya mendo'akan anakmu yang berjuang di perantauan untuk mencari ilmu dan dengan usaha keras.

Sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan.

Merekalah sosok figur dikehidupan ku dan takan bisa aku membalas jasa-jasa mereka yang diberikan untukku.

Untuk kedua adikku, Sigit dan Mila. Keponakanku Eni, Elsa, kalian semua adalah motivasi terbesarku selama ini untuk berusaha dan menjadi contoh terbaik untuk kalian, terimashih adik-adiku....dan untuk seseorang terkasih yang sedang menunggu disana semoga tetap sabar menunggu dan menghadapiku.

***“Merubah Apa Yang Kita Buat Itu lebih Mudah, Daripada Membuat Apa Yang Kita Rubah”.***

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ إِمَانُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : ”Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaakan”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah ayat 11. Semua terjemahan ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdullillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi penulis yaitu ***“Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”***, yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mendapatkan gelar sarjana. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat disusun dengan baik tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

4. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M. Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabarnya memberikan saran dan masukan secara teliti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. H. Afif Rifai, M.S. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat selama proses studi.
6. Para dosen dan staff di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk ucapan terima kasih yang telah membekali penulis ilmu-ilmu selama penulis mengenyam pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu dan Bapakku tercinta yang tak henti-hentinya mendo'akan penulis agar bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik, serta dukungan keluarga yang terus mengalir untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua adik-adikku yang menjadi motivasi terbesar di dalam mewujudkan cita-cita setelah ayah dan ibu.
9. KH. Ahmad Muwaffiq yang sudi menerima, mendidik serta mengajarkan penulis untuk belajar hidup sesuai apa yang diajarkan al-Qur'an dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
10. Gus Imdad Zuhri yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan kuliah.
11. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syahadat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang mengajarkan diskusi, aksi, evaluasi dan yang tak terlupakan ialah demo di pertigaan UIN.

12. Sahabat-sahabati Corp Perwira yang menjadi bagian dalam proses kehidupan penulis selama menempuh studi.
13. Keluarga Besar Forum Siltaruhami Mahasiswa Batang Yogyakarta yang merupakan tempat diskusi kedaerahan selama penulis tinggal di Yogyakarta
14. Sahabat-sahabati Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia yang mengajarkan untuk mengenal seluruh mahasiswa Batang di Indonesia
15. Kakang-kakangku Warkop Jombor yang setia mensehati penulis baik sepiritual maupun intelektual
16. Teman-teman angkatan 2014 Prodi Pengembangan Masyarakat.
17. Sahabat-sahabati Kelompok PPM Pertamina Rewulu, yaitu Arina, Anisa, Aweng, Azizah, Khakim, Rahma, Ulin dan Ulfy merupakan rekan kerja PPM di Pertamina Rewulu, Dusun Gamol dan Sumber Gamol.
18. Yang terkenang dan tak terlupakan Kelompok KKN 93 “Sorogenen 1”, yaitu Fafa, Umi, Ipeh, Lely, Indah, Asfari, Fahrur dan Danar.
19. *Patner Wira-Wiri*, Arifin Kusuma Wardani, Aweng, Usman, yang merupakan sahabat-sahabat seperjuangan sepanjang masa.
20. Kawan-kawan Nge-Kost, yaitu Willy, Ainun, Ipung.
21. Sahabat seperjuangan di Desa Teguh yang sudah mengorbankan waktunya untuk membantu penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca yang sehat dan membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 05 Maret 2018

Penulis

Muhammad Nafiudin  
14230040

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ada sejak dulu dan sering berimplikasi terhadap perbuatan negatif, seperti kebodohan, pencurian dan bahkan sampai menjual harga diri. Kemiskinan terjadi di semua lini, termasuk di pedesaan tidak kecuali di Desa Jambangan. Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti dengan program BLT, RASKIN, dan PNPM Mandiri, namun program-program itu belum bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan UU No 6 Tahun 2014 atau UU Desa yang memberikan kuasa kepada desa untuk bisa mengurus dirinya dan juga turut berusaha mengentaskan kemiskinan, guna kesejahteraan bersama Pasal 4 huruf b. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai implementasi dana desa terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang berdampak pada pengentasan kemiskinan di desa. Fokus penelitiannya adalah implementasi dan dampak yang dirasakan masyarakat setelah dana desa itu dilaksanakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penulisan laporan analisis deskriptif. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, ketua DPD, dan masyarakat miskin. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara.

Melalui analisis data hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Implementasi dana desa bisa dikatakan berjalan dengan baik, dilihat dari prosesnya ini sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pedoman Buku Saku Dana Desa. Hal ini karena pelaksanaan dana desa sudah melalui tahap perencanaan, musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pembuatan peraturan desa, pelaksanaan dan pelaporan ke gubernur. Dilihat dari alokasinya anggaran pada tahun 2016 Rp619,925 juta digunakan untuk infrastruktur dan Rp38,5 juta untuk pemberdayaan masyarakat. 2) program dana desa punya dampak untuk mempermudah mobilitas masyarakat, saluran irigasi semakin baik yang bisa meningkatkan hasil panen, bertambahnya pengetahuan dan terciptanya kesadaran masyarakat. Dana desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan, meskipun dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari pada untuk pemberdayaan masyarakat

***Kata kunci: Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan, Desa Jambangan***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	33
I. Sistematika Pembahasan.....	39

<b>BAB II: GAMBARAN UMUM DESA JAMBANGAN.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Desa Jambangan.....	41
1. Sejarah Desa Jambangan.....	40
2. Letak Desa Jambangan.....	43
3. Struktur Penduduk.....	43
4. Kondisi Sosial.....	44
5. Sarana dan Prasarana .....	45
6. Budaya dan Agama .....	46
7. Kondisi Perekonomian .....	47
8. Struktur Pemerintah Desa Jambangan.....	48
9. Visi Misi Pemerintah Desa Jambangan.....	50
B. Sejarah Singkat Dana Desa Di Desa Jambangan.....	51
1. Sejarah Dana Desa .....	51
2. Kemiskinan Di Desa.....	54
3. Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan.....	56
<b>BAB III: IMPLEMENTASI DAN DAMPAK DANA DESA.....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi Dana Desa Bagi Pengentasan Kemiskinan Di Desa Jambangan.....	61
1. Proses Perencanaan Implementasi Dana Desa.....	61
2. Alokasi Penggunaan Dana Desa.....	74
B. Dampak Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan.....	80
1. Dampak Hasil Fisik.....	82
2. Dampak Hasil Non Fisik.....	85
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>89</b>

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Luas dan Batas Wilayah Desa Jambangan.....	43
Tabel 2 Pertumbuhan Penduduk Desa Jambangan.....	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Desa Jambangan.....	46
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Jambangan.....	47
Tabel 6 Struktur Pemerintah Desa Jambangan.....	48
Tabel 7 Jadwal Musyawarah Dusun Desa Jambangan.....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Balai Desa Jambangan.....	41
Gambar 2 Pembangunan MakadaM.....	77
Gambar 3 Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pelatihan Tata Boga.....	79
Gambar 4 Hasil Pembangunan Infrastruktur.....	82
Gambar 5 Hasil Pembangunan Irigasi.....	84
Gambar 6 Pelatihan Para Legal.....	86
Gambar 7 Pelatihan Kader Kesehatan dan Sosialisasi PAUD.....	88

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jambangan.....49

Bagan 2 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian.....63

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Pembagian Alokasi Dana Desa.....	76
Grafik 2 Daftar Implementasi Dana Desa Bidang Infrstruktur.....	77
Grafix 3 Daftar Implementasi Dana Desa Bidang Pemberdayaan.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari adanya kesalahan pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini yaitu : ***Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang***, maka dipandang perlu adanya penegasan beberapa istilah mengenai istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut.

#### **1. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

#### **2. Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan berasal dari dua kata pengentasan dan kemiskinan. Menurut KBBI pengentasan memiliki arti mengangkat (dari suatu tempat ke tempat lain)<sup>2</sup>, sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)<sup>3</sup>. Berdasarkan hal tersebut pengentasan kemiskinan adalah proses atau cara untuk mengentaskan masyarakat dari keadaan

---

<sup>1</sup>PP NO 43 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat 8.

<sup>2</sup>Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://www.kbbi.web.id/entas>, diakses tanggal 8 Maret 2018.

<sup>3</sup>Ebta Setiawan, diakses tanggal 8 Maret 2018.

serba kekurangan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ada di desa Jambangan melalui program-program yang didanai oleh dana desa.

### **3. Implementasi**

Pengertian Implementasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pelaksanaan<sup>4</sup>. Berdasarkan hal tersebut implementasi di sini adalah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan dana desa untuk pengentasan kemiskinan di Desa Jambangan yang meliputi proses perencanaan atau pelaksanaan dari alokasi anggaran. Penelitian ini juga meneliti tentang dampak.

### **4. Desa Jambangan**

Jambangan Bawang Batang adalah nama desa dimana penelitian ini dilakukan. Secara administratif, Desa Jambangan termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bawang. Letak geografis desa ini terdapat disebelah timur Kota Batang dengan jarak sekitar 50 km dari ibu kota kabupaten. Adapun tepatnya desa ini berada di Jl. Jlamrang- Jambangan km 01 selatan ibu kota kecamatan<sup>5</sup>.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas maka maksud dari judul skripsi : *Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*, adalah penelitian terhadap upaya pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah berupa dana desa mulai dari proses perencanaan, alokasi, dan dampaknya untuk mengentaskan masyarakat yang termasuk daftar masyarakat miskin di Desa Jambangan.

---

<sup>4</sup>Ebta Setiawan, diakses tanggal 25 Maret 2018.

<sup>5</sup>Data diolah dari observasi dan domenetasi RPJM-Desa Jambangan 2016-2022, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, pada tanggal 15 Januari 2018

## B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan seseorang gelap mata sehingga melakukan beragam hal negatif untuk mencukupi kebutuhan, misalnya pelacuran, pencurian, penipuan, bunuh diri, dan banyak hal lain akibat dari kemiskinan yang membelenggu.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering kali tidak disadari, kehadiranya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan dengan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Di negara-negara berkembang secara umum dan di negara-negara muslim sendiri telah dilakukan program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup>Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hlm. 13.

pemerintah, individu maupun masyarakat. Seperti di Indonesia sendiri program pemerintah dalam pemberdayaan dan pengentasan kaum miskin telah dilaksanakan dengan program sejak akhir 60-an. Selama dua dekade pembangunan berbagai program anti kemiskinan telah diciptakan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Prioritas utama pemerintah ditunjukan pada pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk mencapai tujuan itu berbagai program anti kemiskinan telah diciptakan, mulai dari program bantuan pemberian modal kerja bagi kelompok miskin sampai dengan program transmigrasi yang bertujuan memberi lahan bagi mereka yang tidak memiliki lahan. Kemudian untuk meratakan pembangunan antar daerah pemerintah menciptakan berbagai program Inpres yang menyediakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat memperlancar upaya pemberian pelayanan dasar bagi kelompok miskin di daerah pedesaan<sup>7</sup>.

Untuk menurunkan tingginya tingkat kemiskinan berbagai program pengentasan telah banyak dilakukan. Pemerintah SBY mengeluarkan anggaran tidak sedikit, yang setiap tahunnya terus meningkat. Sejak tahun 2004, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 19 triliun rupiah. Kemudian naik 24 triliun rupiah pada tahun 2005. Lalu pada tahun 2006 digelontorkan anggaran sebesar 42 triliun rupiah. Lantas pada tahun 2007 dinaikkan menjadi 51 triliun rupiah. Pada tahun 2008 ditinggikan lagi menjadi 58 triliun<sup>8</sup>. Sementara pada era Jokowi anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap

---

<sup>7</sup>Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, hlm. 30.

<sup>8</sup>Anang Solihin Wardan, *Peduli Kemiskinan* (Bandung: Rosda,2009) hlm.17.

tahun. Digulirkan sejak 2015, dana desa awalnya hanya sebesar Rp20,76 Triliun. Kemudian pada 2016 naik menjadi Rp46,9 Triliun. Lalu tahun ini sebesar Rp60 Triliun<sup>9</sup>.

Dengan anggaran yang sangat besar itu, pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. **Pertama**, penyaluran bantuan langsung dalam bentuk, seperti BLT, raskin, dana BOS, Jamkesmas (Askeskin), Program Keluarga Harapan (PKH), obat murah, dan banyak lagi lainnya. **Kedua**, program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan desa di daerah tertinggal dan daerah khusus. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek: pendikan, ekonomi, jalan, jembatan, dan sebagainya. **Ketiga**, pemberian pinjaman bagi masyarakat yang bergerak dalam usaha mikro, kecil, dan menengah juga koperasi.<sup>10</sup>

Itulah sebagian bentuk program yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaanya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan antara desa dan kota di Indonesia. Upaya pembangunan di Indonesia masih menyisahkan banyak masalah sehingga tidak merata.

Dalam perkembanganya pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama di daerah pedesaan agar tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengesahkan undang-undang tentang desa. Setelah menempuh perjalanan panjang

---

<sup>9</sup>Anggun P. Situmorang <http://m.merdeka.com/uang/ini-alasan-pemerintah-jokowi-terus-tambah-jumlah-dana-desa-tiap-tahun.html> diakses tanggal 08 Januari 2018. Pajar Hatma Indra Jaya, " Dream" and Poverty Alleavition, *Jurnal Mimbar*, Vol. 33, No.1 Juni 2017. Hlm. 107.

<sup>10</sup>Anang Solihin Wardan, *Peduli Kemiskinan* (Bandung: Rosda,2009) hlm.17.

selama tujuh tahun (2007-2013), akhirnya RUU Desa disahkan menjadi Undang-undang Desa pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Republik Indonesia (18 Desember 2013). Mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, DPR, DPRD, para kepala desa dan perangkat desa, hingga aktivis desa menyambut dengan suka cita kelahiran UU Desa.<sup>11</sup> Dalam undang-undang itu disebutkan dengan jelas bahwasanya desa berhak mengatur dirinya baik dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk membuat desa berdaulat serta mandiri dalam berbagai hal.

Desa yang dulunya hanya dijadikan objek pembangunan kini mempunyai peran yang lebih dalam pembangunan nasional. Salah satu strategi pemerintah agar membuat desa menjadi mandiri adalah dengan memberikan dana desa. Dana desa merupakan amanah atau buah atas disahkanya dari UU No 6 Tahun 2014. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup>

Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk desa mulai dari Rp600.000.000,00 sampai 1,4 miliar per desa. Penggunaan dana desa diatur dalam peraturan menteri keuangan, menteri dalam negeri dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di

---

<sup>11</sup>Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hlm. XV.

<sup>12</sup>PP NO 43 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat 8.

bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan desa seperti, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk kebutuhan infrastruktur, lingkungan permukiman, transportasi, energi dan informasi komunikasi, sarana prasana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Bidang pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam pasal 7 PP No 60 Tahun 2016, dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.<sup>13</sup> Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan meliputi, peningkatan partisipasi masyarakat, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.

Tentunya dengan dianggarkan dana desa tidak lain adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan dan mengentaskan masyarakat miskin dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu menghidupi dirinya secara mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung desa masih banyak mengalami kendala yang dihadapi dalam merealisaikan dana desa, seperti tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber daya manusia yang belum siap untuk menerima dana desa. Diharapkan dengan adanya dana desa ini kemiskinan yang ada di desa bisa dientaskan melalau program yang dibiayai dengan dana desa. Terutama program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat benar-benar sesuai dengan keinginan orang miskin yang ada di desa.

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016

Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang terletak diantara desa Gunung Sari di sebelah barat, timur desa Kebaturan, utara desa Jlamrang dan selatan desa Pranten, kurang lebih 50 KM menuju kota Kabupaten dan 3 KM menuju kota Kecamatan. Desa Jambangan terletak di bawah Gunung Perahu dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh jasa dan petani. Masuk dalam tipologi desa berkembang<sup>14</sup>, dengan enam dusun. Berdasarkan sumber data yang didapat dari RPJMDes 2016-2017 jumlah penduduk Desa Jambangan kurang lebih 3,526 orang.

Desa Jambangan memiliki alam yang lestari serta diuntungkan dengan letak di bawah Gunung Perahu. Desa Jambangan memiliki sumber daya air yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan hasil pertanian dan perikanan. Pada tahun 2016 desa Jambangan mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp658.425.000,00 dan 2017 sebesar Rp866.218.000,00. Dengan adanya anggaran khusus desa pemerintah Desa Jambangan diharapkan bisa menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut, serta dapat membendayakan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Berawal dari rasa keyakinan bahwa dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk desa ini dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada, dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ***"Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang"***.

---

<sup>14</sup>Desa berkembang atau desa swakarsa berada beberapa level di atas desa swadaya. Desa ini berkembang dengan mulai memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya namun masih terkendala dengan minimnya dana atau sumber keuangan. <http://pustaka-virtual.blogspot.com/2012/11/difinisi-jenis-pedesaan.html?m=1> diakses pada 14 Mei 2018.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dana desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang?
2. Bagaimana dampak implementasi dana desa bagi pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Di dalam setiap penelitian tentutunya memiliki tujuan yang mendasari mengapa penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang?
2. Mendeskripsikan bagaimana dampak implementasi dana desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang?

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a) Sebagai upaya menjelaskan mengenai implementasi dana desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial baik umum atau khusus bagi Prodi Pengembangan Masyarakat.

- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenisnya yaitu penelitian yang berkaitan dengan dana desa dan pengentasan kemiskinan.
2. Kegunaan secara praktis
- a) Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan di desa Jambangan, Bawang, Batang.
  - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa, serta dapat memberikan contoh bagi desa desa lain yang ada di Indonesia tentang bagaimana cara menggunakan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  - c) Mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang dana desa dan pengentasan kemiskinan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian dan karya terdahulu:

Buku berjudul *Islam & Pengentasan Kemiskinan* karya Wildana Wargadinata. Buku tersebut mengambil pokok bahasan pemikiran Qardhawi tentang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat yang merupakan sub bahasan dari ekonomi Islam. Beliau memilih permasalahan ini kerena menurut beliau lebih menyentuh persoalan yang paling krusial yang dirasakan umat Islam sekarang yaitu kemiskinan. Buku itu mengambil fokus pada kajian tentang konsep pengentasan kemiskinan dalam pandangan Yusuf Qardhawi

yang memiliki pendekatan yang cukup variatif.<sup>15</sup> Didalam buku itu mengemukakan tentang berbagai cara pengentasan kemiskinan mulai dari teori n-Ach, menabung dan investasi, manusia modern dan cara-cara pengentasan kemiskinan melalui cara islam. Seperti, kerja, jaminan sanak famili, zakat, baitul mall, dan kewajiban lainnya.

Selain itu juga Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* menekankan pada zakat<sup>16</sup>. Buku itu membahas tentang zakat, pengelolaan dan peruntukanya sebagai solusi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Buku tersebut penting untuk menjadi kerangka penelitian ini. Perbedaan skripsi dan buku ini terletak pada sarana yang digunakan, tetapi mempunyai tujuan yang sama yang itu pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya skripsi dengan judul: *Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPU DIY tahun 2001-2003*, yang disusun oleh Fatmawati<sup>17</sup>. Skripsi itu membahas tentang zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa ada tiga pola distribusi zakat yang diterapkan. Yaitu, kosumtif, produktif, dan bantuan sosial. Selain itu studi yang dilakukan Fatmawati juga memberikan penjelasan pandangan Islam terhadap sistem penyaluran zakat PKPU DIY yang mengacu pada sistem penyaluran zakat yang berupa konsumtif dan produktif. Kesamaan skripsi ini terletak pada

---

<sup>15</sup>Wildan Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011)

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet, 1, Terj. Syafril Halim (Jakarta: Bina Insani Perss, 1995)

<sup>17</sup> Fatmawati, "Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPU DIY tahun 2001-2003", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan<sup>18</sup>. Namun memiliki perbedaan pada obyek yang digunakan dalam implementasinya sebagai upaya pengetasan kemiskinan.

Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, dalam jurnal “*Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)*”. Beras untuk rakyat miskin sebenarnya sangat berpengaruh dalam membantu mengurangi beban biaya pengeluaran, namun dalam penelitian ini ditemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat dari implementasi beras miskin. Seperti, beras yang diterima tidak sesuai dengan petunjuknya, anggaran dari pemerintah yang minim sehingga masyarakat harus menganti biaya pendistribusian beras dan beras yang tidak tepat sasaran dikarenakan dibagi rata kepada yang kaya dan miskin. Penelitian Bayu menekankan pada program jaminan atau perlindungan kepada masyarakat miskin secara langsung.

Oni Nugrianti dan Zulkarnaini dalam jurnal yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana Desa*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Seperti, tunjangan perangkat desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan

---

<sup>18</sup> Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, “*Implementasi Proram Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)*”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 3, No 12, Hal. 2028-2032.

kelembagaan desa dan pemberian bantuan modal bagi kaum perempuan yang memiliki kelompok usaha atau usaha kelompok guna membantu kehidupan keluarga. Hasil dari program ini sangat baik terutama pada program pemberian modal, namun karena faktor ketidak beranian masyarakat untuk mengikuti, program ini kurang efektif sehingga diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa keberhasilan pemberdayaan adalah adanya kepemimpinan dari ketua pelaksana, optimalisasi potensi pada diri masyarakat sehingga bisa menghasilkan inovasi baru, kepercayaan, keja tim dan komunikasi yang baik antar anggota. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD disebabkan kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola ADD dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana tidak lakukan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat desa akan program yang dijalankan pemerintah semakin tinggi. Selain itu juga ketidakterlibatan unsur unsur yang ada di desa dalam musyawarah menjadi penghambat dalam pemberdayaan, sehingga aspirasi masyarakat tidak tecapai dan usulan kegiatan hanya di dominasi aspirasi dari perangkat desa.<sup>19</sup> Jurnal Oni Nugrianti dan Zulkarnaini memiliki perbedaan dengan skripsi ini, perbedaan itu terletak pada anggaran pembiayaan yang digunakan. Yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

---

<sup>19</sup> Oni Nugrianti dan Zulkarnaini, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana Desa". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 4, Nomor 1, Maret 2013.

Isnain Murdiansyah dalam jurnal “*Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Bebasis Pemberdayaan Masyarakat*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada program Gardu-Taskin di kabupaten Malang melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK). Program ini sudah berjalan efektif, namun dikemukakan juga hal-hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan lembaga seperti, kurangnya modal, kredit macet, masih didominasi perangkat desa serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Metode pengentasan kemiskinan dalam penelitian itu adalah dengan cara membentuk lembaga UPK Anggrek yang tujuannya memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Melalui UPK itu dilakukanlah pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan membuat kripik pisang, tempe dan lain-lain. selain itu UPK juga membangun kemitraan dengan berbagai instansi dan membangun partisipasi dengan seluruh masyarakat<sup>20</sup>.

Muh. Sayuti juga dalam jurnal “*Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Dalam Upaya Penegentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala*” pada penelitian ini membahas tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui pelembagaan BUMDes untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi pertanian yang ada di desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa di kabupaten Donggala yang mayoritas

---

<sup>20</sup> Isnain Murdiansyah, “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Bebasis Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang”, *Jurnal WIGA*, Vol 4, Nomor 1, Maret 2014.

penduduknya petani.<sup>21</sup> Penelitian ini tidak menjelaskan tentang modal awal yang digunakan dalam pendirian BUMDes, tetapi lebih menekankan kepada model BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal yang mengutamakan model kelembagaan, organisasi dan manajemen serta fasilitasi yang ideal bagi pemberdayaan masyarakat. Program ini berhasil dilakukan dan menjadi penyemangat berwirausaha masyarakat, selain itu program pelembagaan BUMDes ini berhasil menjadi pemicu lahirnya BUMDes lain di kabupaten Donggala.

Masih dalam ruang lingkup kemiskinan di Indonesia. Karya Bagong Suyanto yang bejedul *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa* menjadi referensi tambahan bagi penyelesaian masalah kemiskinan di negeri ini, dan adapula buku yang berjudul *Kemiskinan di Perkotaan* karya Parsudi Suparlan.<sup>22</sup>

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah ada, meskipun bersifat pengembangan penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar baik objektivitas penelitian maupun subjek penelitian. Dari beberapa teori yang di atas itu peneliti belum menemukan literatur secara khusus yang membahas tentang pengentasan kemiskinan melalui Dana Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga semakin mempertegas penelitian yang akan dilakukan penulis.

---

<sup>21</sup>H. Muh. Sayuti, "Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Dalam Upaya Penegentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala ", *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, Vol.03 No. 02 Oktober 2011.

<sup>22</sup>Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Probelem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta: Aditya Medika,1996).

## G. Landasan Teori

### 1. Kemiskinan

Masalah kemiskinan bukanlah masalah baru. Masalah kemiskinan ada sejak jaman dahulu, berbagai negara dan agama telah mencoba berbagai cara untuk mengakhiri permasalahan kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan sebuah masalah besar yang implikasinya bisa menyebabkan seseorang jauh dari tuhannya, bahkan Sahabat Ali bin Abi Tholib pernah mempertegas “seandainya kemiskinan itu berwujud manusia maka aku akan membunuhnya”<sup>23</sup>.

Islam telah menyatakan perang atas kemiskinan dan mengepungnya habis-habisan demi menghindari bahayanya tehadap akidah, akhlak, dan perilaku, melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga ketentraman dan keutuhan mereka, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antar umat. Islam mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana manusia di masyarakatnya, yaitu kehidupan yang tepenuhi –sedapat mungkin –semua kebutuhan pokoknya berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian musim panas serta musim hujan. Selain itu juga keperluan-keperluan lain, seperti buku, alat-alat keterampilan, juga nikahnya. Secara garis besar, orang muslim itu mesti mempunyai tarap sesuai situasi, membantu melaksanakan kewajiban agama, menanggung beban hidup, dan melindunginya dari kemelaratan serta kesengsaraan.<sup>24</sup>

Tidak berlebihan pula kalau masalah kemiskinan merupakan masalah yang amat besar mengingat dampak dari kemiskinan bisa menyebabkan seseorang berperilaku negatif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan dapat

---

<sup>23</sup>Fahmi Huwaidi, *All-Qur'an Wa Al-Sulta* ( Kairo: Dar al-Syurq. 1991). Hlm. 172.

<sup>24</sup>Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010 ), hlm.42.

mengancam integritas teologis ( keimanan ) si miskin. Masalah kemiskinan menjadi masalah yang memerlukan berbagai solusi untuk menanggulanginya.

#### a. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Kemiskinan – secara singkat— diberikan definisi sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yakni adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku di masyarakat<sup>25</sup>. Definisi demikian menempatkan kemiskinan sebagai sesuatu yang relatif, tergantung pada standar kehidupan yang umum yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang tidak sama standar kehidupan mereka pada umumnya. Sekalipun demikian, tentu terdapat pengertian kemiskinan secara hakiki yakni suatu kondisi tak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia, khususnya makan.<sup>26</sup>

Menurut Bradley R Schiller kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial yang terbatas. Sementara itu menurut Emil Salim kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.<sup>27</sup>

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki kemiskinan adalah orang yang tidak mempunyai suatu apapun. Mazhab Hambali mengartikan miskin yakni orang

---

<sup>25</sup>Parsudi Suparlan (ED.), *Kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm.11-12.

<sup>26</sup>Sajogjo menetapkan garis kemiskinan berdasarkan penghasilan rumah tangga senilai 240 kg beras per orang setahun di pedesaan, dan setara dengan 360 kg beras untuk di kota. Lihat Sajogjo “Golongan Miskin dan Partisipasinya (nya, sic!) dalam pembangunan Desa” dalam *prisma*, Maret, 1997, Nomor 3. Hlm. 10.

<sup>27</sup>A Lavitan dalam Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* , (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.4.

yang mempunyai harta seperdua keperluanya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Sedangkan mazhab Syafi'I mengartikan kemiskinan yakni orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai mencukupi.<sup>28</sup>

Pendapat lain menyatakan miskin adalah orang yang pemasukannya tidak dapat memenuhi untuk pengeluarannya. Kadang-kadang ia memiliki seribu dirham padahal ia seorang yang miskin. Dan kadang-kadang ia hanya memiliki kapak dan tali akan tetapi ia orang kaya. Pondokan atau rumah kecil yang menjadi tempat tinggalnya dan pakaian yang menutupi kadar keadaanya tidaklah dapat melepas nama miskin.<sup>29</sup> Tidak hanya itu Herman Miller berpendapat bahwa kehilangan harapan adalah esensi dari kemiskinan. Dilihat dari segi ini Miller berpendapat bahwa kemiskinan yang sebenarnya dewasa ini lebih besar jika dibandingkan dengan keadaan sekarang ini.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat dimengerti dan disimpulkan bahwa kemiskinan adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhnya. Kemiskinan merupakan sumber-sumber penyebab dari berbagai masalah sosial yang lainnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi yang perlu mendapat jawaban adalah mengapa ada sebagian orang mengalami kemiskinan dan apa yang menjadi penyebab dari timbulnya kemiskinan tersebut.

---

<sup>28</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah 1954), hlm.207.

<sup>29</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*. Terj. Muhammad Zuhri (Semarang: Asy Syifa 1990), hlm.48.

<sup>30</sup>Nabil Subhi Ath-Tahwil, *Kemiskinan dan Ketebelakangan Di Negara-Negara Muslim*. Terj. Muhammad Bagir (Bandung: Mizan 1993), hlm. 137.

## b. Sebab-sebab Kemiskinan

Menurut Didin Hafifudin<sup>31</sup> penyebab terjadinya kemiskinan paling tidak berasal dari dua hal atau bahkah kedua-duanya. *Pertama* kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan tidak mampu seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua* kemiskinan struktural yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman. Harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan menurut Kuncoro penyebab kemiskinan sebagai berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Sendalam Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan

---

<sup>31</sup>Didin Hafifudin, *Panduan Praktis Tentang zakat Infak dan Shodaqoh*. (Jakarta: Gema Insani Pers. 1998), hlm.155-156.

demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain<sup>32</sup>.

Menurut Saad<sup>33</sup> sebab-sebab terjadinya kemiskinan terkait dengan model interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam dan dengan masyarakatnya. Sebab-sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam terjadi bila dilakukan pola destruktif antara manusia dan alam, seperti eksploitasi alam tanpa melakukan analisis dampak lingkungan, kecenderungan untuk menghabiskan seluruh potensi alam, keengganan melakukan peremajaan demi kelanjutan alam, dan sebagainya. Akibat lebih lanjut dari pola interaksi demikian ialah terjadinya kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik generasi yang sedang eksis maupun generasi selanjutnya. Di sisi lain kondisi alam yang gersang dan tidak memiliki potensi yang bisa dikembangkan juga merupakan cobaan yang diberikan tuhan kepada umat manusia sebagaimana yang dilukiskan al-Quran dalam surat al-Baqaroh ayat 155.

Sedangkan sebab-sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia itu sendiri adalah kurangnya percaya pada kemampuannya, keengganan mengaktualisasikan potensi yang ada dalam bentuk kerja nyata yang serius, serta keengganan memberikan respek optimal terhadap perputaran waktu.

---

<sup>32</sup><http://imanarsyad.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-kemiskinan-dampak-akibat-dan.html>, diakses pada 23 November 2017.

<sup>33</sup>Saad IH (1997), *Op.Cit.*, hlm. 75.

Sedangkan salah satu sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ialah terkosentrasinya modal di tangan orang-orang kaya (konglomerat). Terkosentrasinya modal di tangan mereka menyebabkan orang-orang fakir tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya demi meraih optimal terhadap perputaran waktu.

Menurut teori *development of under development*<sup>34</sup> atau teori ketergantungan-dominasi (*dominance-dependency*) bahwa sebab-sebab kemiskinan dan keterbelakangan bukanlah sekedar faktor-faktor yang tedapat pada masyarakat yang bersangkutan seperti kurangnya modal, pendidikan yang rendah, kepadatan penduduk, kurangnya gizi dan sebagainya. Lebih dari itu faktor-faktor tersebut hanyalah merupakan atribut kemiskinan saja, tetapi kemiskinan itu sendiri berakar dari sejarah exploitasi, terutama yang dilakukan oleh kekuatan kapitalis asing atau internasional yang melakukan penetrasi, dominasi dan pengurukan keuntungan dari daerah pinggiran ke pusat-pusat metropolis.

Apapun penyebab timbulnya kemiskinan masalah sosial ini harus selalu mendapat perhatian yang lebih serta harus ditanggulangi dengan sebaik mungkin, kalau tidak ingin sewaktu-waktu menjadi bencana "Bom Waktu" yang bisa meledak kapan saja di tengah masyarakat yang akan merugikan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat serta kestabilitasan bangsa dan negara. Melihat beberapa teori penyebab kemiskinan di atas. Penulis lebih menyetujui apa yang dikatakan Didin Hafifudin, yaitu kemiskinan yang datangnya dari diri

---

<sup>34</sup>M. Dawam Raharjo, *Esensi-Esensi Ekonomi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1985). hlm. 8.

manusia seperti malas dan tidak mau untuk bekerja ( kemiskinan kultural) dan kemiskinan struktural seperti tidak terlibatnya masyarakat miskin dalam mengambil sebuah kebijakan.

c. Metode Pengentasan Kemiskinan

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menaggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan garis standar kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, tak sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin antara lain melalui pemberian bantuan dana IDT, PDM-DKE, program Takesra-Kukesra, JPS, PPK, BLT, PKH, dan lain lain membangun infrastruktur di permukiman kumuh, pengembangan model pembangunan kawasan terpadu, temasuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Selain berbagai program yang diberikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, pemerintah juga menggunakan pemberdayaan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Masalah pemberdayaan masyarakat tidak pernah lepas dari masalah pembangunan dan perubahan sosial. Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan (*The Age of Development*). Zaman dimana suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut gagasan pembebasan masalah

---

<sup>35</sup>Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penangannya* (Malang: In-TRANS Publishing, 2013), hlm. 14.

kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga.<sup>36</sup> Istilah “dunia ketiga” sekarang ini memang agak ketinggalan zaman, terutama setelah perang dingin antara dunia pertama (blok kapitalis) dan dunia kedua (blok sosialis) berakhir. Sebagaimana diketahui, yang dimaksud dunia ketiga adalah negara-negara yang tidak masuk kedalam blok tersebut. Tetapi dalam perkembangannya, istilah dunia ketiga lebih diartikan sebagai negara-negara yang secara ekonomi masih miskin, atau negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat idiologinya<sup>37</sup>.

Di abad modern seperti ini, berbagai pemikiran pembangunan baru untuk mengentaskan kemiskinan terus dikembangkan, terutama untuk masalah kemiskinan di dunia ketiga. Ada beberapa teori pembangunan yang menurut peneliti dapat digunakan sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, diantara teori teori itu adalah :

a). Teori Harrad-Domar: Tabungan dan Investasi

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikembangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam

---

<sup>36</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997). hlm. 40.

<sup>37</sup>Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia.1996). hlm. ix.

saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara.<sup>38</sup>

Teori ini memang berbeda dengan apa yang terjadi di Dunia ketiga, dimana masyarakat kesulitan untuk menabung dikarenakan penghasilan yang pas-pasan dan hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Teori ini pula juga tidak bisa dipungkiri bahwa teori ini merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, sebagai contoh hasil tabungan bisa digunakan untuk berdagang, berwirausaha, membeli alat-alat produksi dan lain-lain. Begitu besar manfaat dari menabung ini, tentunya harus dibarengi kesadaran dari masyarakat untuk bisa menyisipkan sebagian penghasilan untuk menunjang masa depannya.

Kegiatan menabung ini sudah dilakukan oleh masyarakat desa Jambangan, yaitu menabung yang hanya bisa diambil ketika hari raya Idul Fitri akan datang. Hasil dari kegiatan masyarakat ini digunakan untuk membeli pakaian, daging dan keperluan lainnya. Tentunya tabungan ini sangat membantu masyarakat sesuai dengan pepatah “*Manabung Pangkal Kaya*”.

#### b). David McClelland: Dorongan Berprestasi

McClelland adalah seorang ahli psikologi sosial yang terkenal dengan konsepnya *The Need For Achievement*, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Kosep ini kemudian terkenal dengan simbul yakni : n-Ach. Seperti juga konsep etika protestan, keinginan, kebutuhan, atau dorongan untuk

---

<sup>38</sup> <http://febasfi.blogspot.co.id/2013/05/teori-modernisasi-harrod-domar-tabungan.html> diakses Pada 1 Januari 2018.

berprestasi ini tidak sekedar untuk meraih imbalan material yang besar. Orang-orang dengan n-Ach tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan kerana mendapat imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggap sangat baik.<sup>39</sup>

Teori Motivasi Berprestasi mengemukakan bahwa, manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Teori ini memiliki sebuah pandangan (asumsi) bahwa kebutuhan untuk berprestasi itu adalah suatu yang berbeda dan dapat dan dapat dibedakan dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya<sup>40</sup>.

### c). Teori Inkeles dan David H.Smith: Manusia Modern

Salah satu tokoh yang mencetuskan teori manusia modern adalah Alex Inkeles dan David H.Smith . Beliau mengatakan manusia adalah komponen penting dalam pembangunan. Manusia dituntut untuk dapat mengelola semua material dan kegiatan secara produktif sehingga manusia harus dibentuk secara modern. Manusia modern digambarkan sebagai manusia yang mau menerima perubahan, memiliki orientasi pada masa depan, memiliki kepercayaan akan manusia bisa menguasai alam. Inkeles mengatakan manusia dapat diubah pemikirannya jika sudah dewasa, manusia tradisional dapat dirubah menjadi manusia modern hal tersebut karena manusia hanya sudah terbiasa dengan kehidupan tradisionalnya.

---

<sup>39</sup>Wildan Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang:UIN-MALIKI PRESS,2011), hlm.24.

<sup>40</sup> <http://rnrian.blogspot.co.id/2011/04/teori-motivasi-berprestasi-david-mc.html> diakses pada 1 Januari 2018.

Menurut penelitiannya pendidikan juga merupakan hal yang penting dan memiliki sekala tiga kali lipat dalam merubah manusia dari tradisional menjadi modern. Pengalaman kerja juga akan membuat manusia menjadi manusia modern. Pengalaman kerja yang dilalui manusia jika ia ditempatkan di sebuah industri dan lembaga yang mengharuskan untuk masuk tepat waktu, membuat perencanaan dan bekerja sama dengan orang lain. Media massa juga menjadi pendorong dalam dunia modernisasi. Karena media massa adalah alat dengan skala masif untuk menyampaikan sebuah berita dan informasi yang dapat dijangkau ke seluruh penjuru dunia.<sup>41</sup>

Alex Inkeles dan David H. Smith berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar perkara pemasukan modal dan teknologi saja. Tetapi dibutuhkan manusia untuk mengembangkan sarana material supaya menjadi produktif. Sehingga Inkeles menyebut adanya istilah *manusia modern*. Dalam bukunya *Becoming Modern* mereka menyebutkan ciri-ciri dari manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi kemasa sekarang dan masa depan, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia, bisa menguasai alam bukan sebaliknya dan sebagainya<sup>42</sup>. Dalam pengentasan kemiskinan teori ini mampu memberikan gagasan agar masyarakat mempunyai orientasi ke masa depan yang lebih baik dengan mengapai cita-cita melalui pendidikan dan penguasaan akan teknologi dan informasi.

---

<sup>41</sup> <http://thoughtsoflarasmoo.blogspot.co.id/2017/04/teori-modernisasi-alex-inkeles.html> diakses pada 1 Januari 2018.

<sup>42</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 17.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu terjemahan dari cita-cita bangsa Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam pembukaan UUD 1945,

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarakan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.*

Cita-cita adil dan makmur harus menjadi napas setiap pembangunan di Indonesia. Kenapa kemiskinan dapat menjadi terjemahan dari adil dan makmur karena kemiskinan itu timbul dari berbagai kesenjangan sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia yang bermartabat.<sup>43</sup>

Pemerintah memiliki tugas yang amat besar dalam memecahkan segala permasalahan kemiskinan serta mempunya peran yang sangat penting dalam membangun sistem kehidupan masyarakat yang berdaya, maju dan terbebas dari belenggu kemiskinan serta bisa mewujudkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan pengakuan atas desa dan dana desa, agar desa mampu mengurus dirinya serta menghidupi seluruh elemen yang ada di dalam desa.

Berbicara tentang pengakuan atas desa tentunya tidak lepas dari sejarah panjang tentang adanya desa itu sendiri, bisa dikatakan desa ada sejak sebelum pemerintahan di negeri ini dibentuk. Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa

---

<sup>43</sup>Mukhtar Syafi’I Anam, *Kedaulatan Desa Atas Data Kemiskinan Panduan Pendataan Penduduk Miskin*, ( Kebumen: Lembaga Pemberdaya Pesantren dan Masyarakat Desa (LP2M) Forum Masyarakat Sipil (FORMASI). 2014 . hlm 1.

pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang kita kenal dengan istilah IGO (*Inslanche Gemeente Ordonnatie*). L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (*Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten*) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939, L.N. 1938 Nomor 681. IGO dan IGOB tersebut secara efektif berlaku dari tahun 1906-1942, namun secara tidak resmi dipakai terus sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Walaupun sebelumnya pada tahun 1965 lahir peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang desa, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Namun secara praktis undang-undang tersebut tidak sempat diberlakukan karena pada tahun itu juga terjadi pemberontakan G.30.S/PKI.

Pada tahun 1999 pengaturan tentang desa mengalami berbagai perubahan dan dimasukkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 mengatur desa secara seragam, maka dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pengaturan tentang desa menjadi beragam dan memberikan kemungkinan suatu daerah menentukan sendiri bentuk pemerintahan desanya. Ketentuan ini pun tidak jauh berbeda dari apa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi

undang-undang, memuat pengaturan tentang desa pada Bab XI Pasal 200 Pasal 216.<sup>44</sup>

Peraturan tentang desa beberapa kali mengalami perubahan, hingga akhirnya pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah mengesahkan peraturan baru tentang desa, yaitu adalah UU No 6 Tahun 2014 atau UU Desa. Lahirnya peraturan baru tentang desa tentunya membawa angin segar bagi desa itu sendiri, sebab adanya peraturan ini semakin memperjelas tentang kedudukan desa dan peran desa setelah memiliki payung hukum dalam menjalankan segala urusan yang ada di desa.

Untuk menjalankan UU No 6 Tahun 2014 tentunya pemerintah tidak hanya membuat peraturan yang harus dijalankan di desa, tetapi juga ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk merealisasikannya yaitu dengan dianggarkan dana khusus untuk desa atau yang biasa disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>45</sup> Dapat diartikan bahwa dana desa adalah dana yang dianggarkan negara khusus untuk desa yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan desa.

Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dapat

---

<sup>44</sup><http://maszen.blogdetik.com/2013/09/14/sejarah-pemerintahan-desa> diakses pada 02 Desember 2017.

<sup>45</sup>PP NO 43 Tahun 2014, Bab I Pasal I ayat (8).

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di desa. Program pelaksanaan dana desa adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan basis masyarakat desa, yang mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama daerah yang perlu perhatian pembangunan demi suatu kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut. Pelaksanaan Dana Desa juga merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan perbaikan infrastruktur di pedesaan.

Pemerintah tentunya tidak main-main dengan program nasional dana desa tersebut. Tidak tanggung-tanggung dana untuk merealisasikan program tersebut tergolong cukup besar. Pada tahun 2015, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp20,76 triliun untuk 74.093 desa di seluruh tanah air, sedangkan pada 2016 ini meningkat dua kali lipat menjadi Rp46,9 triliun.<sup>46</sup> Dana tersebut dibagikan ke desa mulai dari 600 juta sampai 1,4 miliar dan pembagianya menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa.

## 2. Implementasi Dana Desa

Pengertian Implementasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pelaksanaan.<sup>47</sup> Implementasi dana desa adalah upaya pelaksanaan realisasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Didalam *Buku Saku Dana Desa* ada

---

<sup>46</sup> <http://www.neraca.co.id/article/64306/mengentaskan-kemiskinan-melalui-dana-desa> diakses pada 02 Desember 2017 .

<sup>47</sup>Epta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://www.kbbi.web.id/entas>, diakses tanggal 8 Maret 2018.

enam prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. *Pertama*, keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. *Kedua*, kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. *Ketiga*, kewenangan desa yaitu mengutamakan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa. *Keempat*, partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. *Kelima*, swakelola dan berbasis sumberdaya desa yaitu pelaksanaan secara mandiri, mengutamakan keterampilan pikiran warga desa. *Keenam*, tipologi desa atau mempertimbangkan keadaan karakteristik desa<sup>48</sup>.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian desa, melakukan pendistribusian dana desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya aspek pemerataan, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa hingga aspek status desa. hingga akhirnya penerimaan pendistribusian desa berbeda-beda.

Mengacu pada peraturan menteri keuangan, pelaksanaan dana desa melalui beberapa tahap. Yaitu mulai dari Perencanaan, Musdes (Musyawarah Desa), rancangan Perdes, pelaksanaan dan pelaporan. Masing masing tahapan itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Desa yang aturan itu sudah ditulis di dalam *Buku Saku Dana Desa* dan diberikan kedesa sebagai bahan rujukan pelaksanaan dana desa.

Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3 dan 6,dana desa diperioritaskan sebagai berikut :

---

<sup>48</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, hlm. 22.

a. Prioritas pelaksanaan penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1 Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan;
- 2 Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- 3 Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

b. Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:

- 1 Mekerabatan desa.
- 2 Hamparan.
- 3 Pola permukiman.
- 4 Mata pencaharian. dan/atau
- 5 Tingkat perkembangan kemajuan desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi pembangunan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman. Pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dideskripsikan dengan kata-kata, sehingga digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Jambangan salah satu pemerintah yang mendapatkan dana desa, tidak ada alasan khusus dalam memilih lokasi penelitian, hanya teknis bisa dilakukan di desa mana saja tetapi dengan alasan tertentu peneliti belum melihat dampak yang signifikan meskipun sudah dilaksanakan dana desa.
- b. Pemerintah Desa Jambangan melakukan implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur, dengan tujuan untuk meningkatkan akses jalan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan mempermudah jalur distribusi di desa Jambangan.
- c. Desa Jambangan merupakan desa dimana penulis berasal, atas dorongan masyarakat dan mengurangi biaya penelitian sehingga penulis melakukan penelitian di desa Jambangan.

## 2. Obyek dan Subyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian dalam studi ini adalah kegiatan-kegiatan implementasi dana desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan di desa Jambangan. Menurut pendapat Moleong subyek penelitian sebagai informan, yang artinya adalah orang yang ada dalam latar penelitian. Subyek penelitian juga bisa dikatakan sebagai orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian<sup>49</sup>.

Untuk teknik pengambilan informan penulis menggunakan *purposive* atau pengambilan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu untuk memperoleh informasi yang diperlukan penulis. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menentukan subyek penelitian yang baik, yaitu mereka yang cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian dana desa, dan yang memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi seputar kajian penelitian<sup>50</sup>. Dalam hal ini yang dijadikan subyek penelitian adalah par pelaksana dan pihak-pihak terkit. Diantaranya adalah :

- a. Kepala desa yaitu Bapak Untung,
- b. Sekretaris desa yaitu Ibu Trikurniawati
- c. Perangkat desa yaitu Darto dan Ono
- d. Ketua BPD Yaitu Jumali
- e. Masyarakat umum yaitu Ibu Rohmi, Khotim, Kesi.
- f. Masyarakat miskin yaitu Bapak Untung, Tutur, Teguh, Slamet,

---

<sup>49</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 132.  
<sup>50</sup>*Ibid.*,

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>51</sup>. Cartwright & Cartwright mendefinisikan suatu proses melihat mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai, perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktifitas salah satu program yang dijalankan pemerintah desa yang dibiayai oleh dana desa, seperti pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa Jambangan Bawang Batang.

#### b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan siapa saja yang di wawancarai. Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi mengatakan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian<sup>53</sup>. Dalam penelitian ini digunakan interview bebas berstruktur, artinya

---

<sup>51</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 1993 ), hal. 136.

<sup>52</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*,( Jakarta: Salemba Humanika,2010) hlm.118.

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi ,*Metodologi Research, Jilid II*( Yogyakarta, Andi Offset,1989),hal,193”. Skripsi (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015) hlm.38. Digilib uin-suka

pewawancara hanya membuat pertanyaan secara garis besarnya saja<sup>54</sup>. Jadi di sini diperlukan kreativitas dari pewawancara dalam menggali informasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini penulis telah mewawancarai beberapa informan yaitu, kepala desa, skretaris desa, perangkat desa, ketua BPD dan masyarakat mskin di Desa Jambangan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, notulen rapat, agenda dan lain-lain<sup>55</sup>. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan program-program yang dibiayai dana desa. seperti, RPJM-Desa dan LPJ Realisasi Dana Desa Tahun 2016-2017.

#### 4. Teknik Validitas Data

Penelitian ini dimaksudkan supaya tidak diragukan keabsahannya, maka perlu dilakukannya pemakaian teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa mengetahui keabsahan penelitian ini. Triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu<sup>56</sup>. Oleh karna itu, penulis bermaksud memilih teknik triangulasi ini untuk mengecek kembali kebenaran data. Sedangkan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan

---

<sup>54</sup>S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : PT. Tariso Banadung, 2003), hal. 72.

<sup>55</sup>Suharisma Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* ,(Yogyakarta: Rineka cipta, 2002)hal. 188 Skripsi (Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015) hlm.39. Digilib Uin-Suka

<sup>56</sup>Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali,2010), hlm. 82.

kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat melalui beberapa sumber<sup>57</sup>. Dengan langkah-langkah yaitu melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi kemudian dibandingkan, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan observasi, seperti pada proses ini penulis mewawancarai Ibu Kurni tentang pembangunan jalan yang bersumber dari dan desa. Hasil wawancara ini penulis perkuat dengan observasi di lapangan dengan melihat hasil dari pembangunan jalan tersebut.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi, seperti pada proses penulis mewawancarai Bapak Darto tentang besaran dana desa yang diterima. Hasil wawancara ini penulis perkuat dengan dokumentasi LPJ dana desa di desa Jambangan.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif yang penyelidikannya ditujukan pada masa sekarang atau permasalahan

aktual dengan data mula-mula disusun kemudian diangkat.<sup>58</sup> Proses analisis data dimula dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, dokumen resmi, lembar foto dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Maka langkah berikutnya adalah mengadakan beberapa langkah untuk mengkategorikan data kedalam satuan-satuan yakni<sup>59</sup>.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengodean, penyederhanaan dari data yang dihasilkan ketika penelitian yang berlangsung di lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang digunakan penulis untuk memilih dan memilih data mana yang akan dipakai dan data mana yang akan dibuang. Tahap ini merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan<sup>60</sup>. Reduksi data ini penulis lakukan ketika proses transkip wawancara, kemudian hasil wawancara penulis memilih hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara yang dirasa tidak perlu dikutip maka penulis abaikan, hasil wawancara yang menurut penulis penting dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka penulis masukkan sebagai hasil.

#### b. Penyajian Data

---

<sup>58</sup> Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode Dan Praktek*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.200

<sup>59</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.218.

Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kemudian tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksa keabsahan data.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika ini dibagi atas empat bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, perincianya sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat

hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II memaparkan tentang gambaran umum Desa Jambangan Bawang Batang. Dalam bab ini memaparkan tentang sejarah, letak geografis, struktur penduduk, kondisi sosial dan ekonomi, struktur pemerintah Desa Jambangan, visi misi pemerintah desa, sejarah singkat, dan implementasi dana desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang.

Bab III berisi tentang hasil penelitian terkait, yaitu pelaksanaan dana desa yang meliputi perencanaan pengalokasian, dan dampak pelaksanaan dana desa bagi masyarakat miskin.

BAB IV : merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari bab sebelumnya serta saran-saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai *“Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa Di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang”*, dengan melihat pelaksanaan perencanaan, musyawarah, pembuatan peraturan desa dan implementasinya tentunya memiliki dampak yang bisa dirasakan langsung bagi masyarakat desa Jambangan, diantaranya adalah :

##### **1. Pelaksanaan Dana Desa**

Pelaksanaan implementasi program-program pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jambangan dalam pemanfaatan dana desa secara umum telah dikatakan baik, namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan melibatkan masyarakat, rencana pembangunan telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musdes. Dari kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan adanya bangunan fisik berupa sarana dan prasarana, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pengetahuan baik soft skill maupun hard skill masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan fisik berupa jalan, irigasi, dan pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan cukup baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa, sehingga

menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung dalam pembuatan jalan dan irigasi.

Keterlibatan masyarakat desa Jambangan dalam pelaksanaan implementasi dana desa sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Meskipun seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat masih dominan diwakili oleh tokoh masyarakat dan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dan terlibat dalam implementasi desa.

## 2. Dampak Pelaksanaan Dana Desa

Dana desa telah berdampak terhadap kemudahan akses keluar dan masuk dusun, memperlancar aktivitas pengangkutan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan akses kemudahan menuju sawah. Kemudian adanya irigasi ini masyarakat merasakan peningkatan hasil panen dan kemudahan mengairi air kepersawahan mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Disisi pelaksanaan untuk pemberdayaan dana desa sudah cukup mampu menambah pengetahuan masyarakat. Namun dilihat dari tujuan utama dana desa, yaitu pengentasan kemiskinan hasilnya belum dikatakan baik. Hal ini hanya angka kemiskinan saja yang mengalami penurunan dan belum bisa mengentaskan kemiskinan yang sifatnya kultural di masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Jambangan,

Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dalam hal implementasi dana desa dan pengentasan kemiskinan antara lain ;

1. Pemerintah Desa Jambangan diharapkan lebih intensif lagi untuk mensosialisasikan dana desa. Meliputi alokasi, distribusi dan fokus program. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam musyawarah, pelaksanaan dan pengawasan implementasi dana desa di Desa Jambangan.
2. Pemerintah desa diharapkan dapat membuat alternatif-alternatif program baru agar aspirasi seluruh masyarakat bisa terserap seperti, pembuatan kotak aspirasi dan saran, terutama dalam upaya bersama-sama mewujudkan pembangunan desa sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Terutama program terkait dana desa dan pengentasan kemiskinan.
3. Dalam pelaksanaan implementasi dana desa pemerintah desa diharapkan dapat melibatkan seluruh masyarakat, tanpa harus memilih-milih masyarakat yang terlibat.
4. Pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Jambangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat.
5. Bagi masyarakat desa diharapkan lebih pro aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan pembangunan desa, jangan menunggu informasi bila perlu mencari informasi tentang pelaksanaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Umuluddin*. Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy Syifa 1990.

Anam, Syafi'I, Mukhtar, *Kedaulatan Desa Atas Data Kemiskinan Panduan Pendataan Penduduk Miskin* Kebumen: Lembaga Pemberdaya Pesantren dan Masyarakat Desa (LP2M) Forum Masyarakat Sipil (FORMASI). 2014.

Arikunto, Suharsmi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta,1993.

Arikunto, Suharisma, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* ,Yogyakarta: Rineka cipta, 2002, Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata, tahun 2015.

Ath-Tahwi, Subhi, Nabil, *Kemiskinan dan Ketebelakangan di Negara-negara Muslim*. Terj. Muhammad Bagir Bandung: Mizan 1993.

Budiman , Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia.1996.

Eko, Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.

Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali,2010.

Fakih, Mansour, *Anlisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Hafifudin, Didin, *Panduan Praktis Tentang zakat Infak dan Shodaqoh*, Jakarta: Gema Insani Pers. 1998.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social*, Jakarta: salemba humanika,2010.

Ibrahi, Saad, *Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qura'an* , Malang:UIN-Maliki Press,2007.

Jaya, Indra, Hatma, Pajar, *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta; MU:3 Communications, 2010

Lavitan A dalam Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* , Yogyakarta: Liberty, 1981.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gama Univ. Press,1995.

Nugrianti, Oni, Zulkarnaini, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana. Kebijakan Publik*", Volume 4, Nomor 1, Maret 2013.

Maret 2017, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta, dalam <http://bisnis.tempo.com>

Moelueng, J, Lexy, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung : Remaja Kerta Karya, 1998.

Murdiansyah, Isnain, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Bebasis Pemberdayaan Masyarakat, Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang*, WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2014 ISSN NO 2088-094493.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016.

PP NO 43 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet, 1, Terj. Syafril Halim Jakarta: Bina Insani Perss, 1995.

Qardhawi, Yusuf, , Muhammad Syekh, *KONSEPSI Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Umar Fanani, Bandung:PT Bina Ilmu Ofset.1996.

Qardhawi, Yusuf, *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya* , Jakarta : Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, grasindo 2010.

Raharjo, Dawam, *Esensi-esensi Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Rais, Amin, M, *Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.

Rasyid, Sulaiman , *Fiqih islam*, Jakarta: Attahiriyyah 1954.

Sajogjo, *Golongan Miskin dan Partisipasinya (nya, sic!) dalam pembangunan Desa” dalam prisma*, Nomor 3 Maret, 1997.

Sayuti, Muh, *Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Dalam Upaya Penegentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala* , ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Bumi Aksara,2008.

Suparlan, Parsudi (ED.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Hrapan, 1984.

Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penangannya*, Malang: In-TRANS Publishing, 2013.

Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan: Probelem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Aditya Medika,1996.

United Nation (ED): *Report of The Word Summit for Social Development in Copenghagen*, April 1995, hal. 54. Dalam *Izzedin Bakht [ et al.], menggempur akar-akar kemiskinan* terj. Frederik Ruma, Jakarta: YAKOMA PGI,2001.

Upe, Ambo,dan Damsid, *Asas-Asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2010.

Warda,, Solihin Anang, *Peduli Kemiskinan*, Bandung: Rosda, 2009.

Wargadinata, Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN-MalikiI Press, 2011.

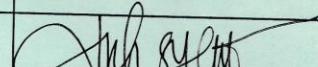
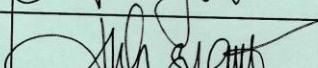
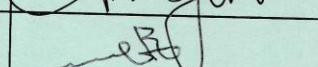
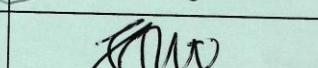
## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak bisa menjelaskan untuk apa saja dana desa bapak pergunakan?.
2. Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa?.
3. Apa alasan pertimbangan dipilihnya program tersebut?..... yang menjadi prioritas penggunaan dana desa.
4. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program tersebut?.
5. Bagaimana proses pemilihan program tersebut?.
6. Dalam musyawaroh, siapa saja yang terlibat?.
7. Dalam musyawaroh aspirasi-aspirasi dari siapa yang sering bapak dengar?.
8. Dalam implementasinya siapa saja yang terlibat?.
9. seperti apa cara bapak mengawasi proses pelaksanaan program tersebut dari awal sampai akhir?.
10. Apakah kebijakan pemilihan program tersebut memenuhi kepentingan orang miskin. Bagaimana pandangan Pemerintah desa terhadap kemiskinan yang ada di desa Jambangan?.
11. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang meliputi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis)?.
12. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah desa jambangan dalam mengelola masyarakat miski?.
13. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah dana desa adakah Pemerintah desa melakukan tindakan sosialisasi?.

14. Dalam pembentukan kebijakan mengenai pengelolaan dana desa, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah desa tersebut?.
15. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa?.
16. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan pengelolaan dana ini dilaksanakan?.
17. Bagaimana koordinasi dengan Pihak pelaksana maupun penerima manfaat?.
18. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi kebijakan program tersebut?.
19. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Masyarakat dan Pemerintah desa dalam mengelola Pengelolaan dana desa?.
20. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengelolaan dana desa?.
21. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah desa untuk mendukung adanya dana desa tersebut?.
22. Apakah Pemerintah desa telah memberikan informasi sebelumnya bahwa di desa ada dana desa?.
23. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah desa?.
24. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan program yang telah dibuat oleh pemerintah dengan dana desa?.
25. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa?.
26. Adakah tindakan pemilihan orang yang terlibat dalam perumusan sampai pelaksanaan implementasi dana desa oleh Pemerintah desa setelah pelaksanaan kebijakan ini dibuat?.

27. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya dana desa tersebut?.
28. Apakah keuntungan/kontribusi yang didapat dengan adanya dana desa tersebut?.
29. Bagaimana dampak implemtasi dari dana desa tersebut dan bagaimana tanggapan Saudara sebagai pengguna manfaat tersebut?.

**NAMA** : Muhammad Nafiudin  
**NIM** : 14230040  
**Fakultas** : Dakwah dan Komunikasi  
**Jurusan/Program Studi** : PMI (Pengembangan Masyarakat Islam)  
**Batas Akhir Studi** : 31 Agustus 2021  
**Alamat** : DANA DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI DI DESA JAMBANGAN, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BATANG

No.	Hari, Tanggal Seminar	Nama & NIM Penyaji	Status	Td. Tangan Ketua_Sidang
1	Jumat, 22 September 2017	Aweng Efendi 14230050	Peserta	
2	Jumat, 22 September 2017	Nisa Azizah 13210058	Peserta	
3	Jumat, 22 September 2017	Novi Herwanto 13210113	Peserta	
4	Rabu, 3 Januari 2018	Eti Etriwana 14210039	Peserta	
5	Senin, 8 Januari 2018	14230040	Penyaji	
6	Jumat, 9 Februari 2018	14230035	Pembahas	

Yogyakarta, 06 Juni 2017

Ketua Jurusan,

  
**Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si.**  
 NIP. 19810428 200312 1 003

**Keterangan:**

Kartu ini berlaku selama dua (2) semester dan menjadi salah satu syarat pendaftaran munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117 [www.uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id)  
Yogyakarta 55281

# **Sertifikat**

NOMOR : UIN.02/R.3/PM.03.2/5980.7/2015

Diberikan kepada :

Nama : MUHAMMAD NAFIUDIN

NIM : 14230040

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
sebagai  
**PESERTA**

Atas keikutsertaannya dalam mengikuti *Character Building Training* bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan tema :  
"Membangun Karakter Berbasis Kebangsaan, Keislaman dan Nilai-Nilai Sunan Kalijaga".

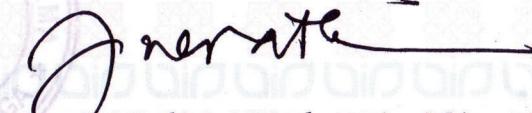
Gelombang III, pada tanggal 12-15 Nopember 2015

Yogyakarta, 23 Nopember 2015

a.n. Rektor,

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA  
NIP. 19630517 199003 2 002



# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

*Muhammad Nafiudin*

**Telah melaksanakan Praktek Pengembangan Masyarakat I  
di Program CSR PT Pertamina TBBM Rewulu,  
mulai dari 7 Januari 2017 s/d 20 April 2017,  
dengan hasil BAIK.**

Yogyakarta, 25 April 2017  
CDO Pertamina TBBM Rewulu

Zukhruf Arifin



## PANWAS KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candigebang No.3 Beran Tridadi Sleman Kabupaten Sleman  
Telp. 0274-865753 Email. Panwas.Sleman@gmail.com

## PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 003/ PP/Panwas-Slm/II/2016

Diberikan Kepada:

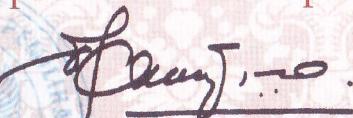
*Muhammad Nafiuddin*

atas peran serta dan pengabdiannya sebagai:

## PENGAWAS TPS

Masa Bakti 17 November 2015 s.d. 16 Desember 2015

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015

  
  
**DJAJADI**  
Ketua



36

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)



## SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.868/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Muhammad Nafiudin  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Batang, 27 September 1993  
Nomor Induk Mahasiswa : 14230040  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Sorogenen I, NOMPOREJO  
Kecamatan : Galur  
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,37 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Ketua



Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.  
NIP. 19720912 200112 1 002



## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.23.10.89/2018

This is to certify that:

Name : **Muhammad Nafiudin**  
Date of Birth : **September 27, 1993**  
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **February 02, 2018** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

<b>CONVERTED SCORE</b>	
Listening Comprehension	<b>35</b>
Structure & Written Expression	<b>41</b>
Reading Comprehension	<b>37</b>
<b>Total Score</b>	<b>377</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, February 02, 2018  
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005





## UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Muhammad Nafiudin  
NIM : 14230040  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	45	D
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	95	A
5.	Total Nilai	76.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 5 Februari 2018  
Kepala PTIPD  
  
Dr. Shofwatul 'Uyun, S.T., M.Kom.  
NIP. 19820511 200604 2 002

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



## **S E R T I F I K A T**

Diberikan kepada :

**Muhammad Nafiudin**  
**14230040**

Atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam acara "Pelatihan Pengembangan Organisasi dan Kepemimpinan"  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

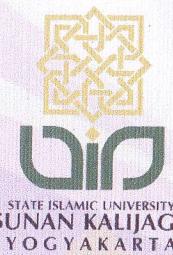
Dekan  
  
Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 29 Oktober 2015  
Ketua



Almatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D  
NIP. 19710919 199603 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

**S E R T I F I K A T**

**NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**MUHAMMAD NAFIUDIN**

**14230040**

**LULUS dengan Nilai 80 ( A )**

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D  
NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

# شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.23.7.10/2018

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Muhammad Nafiudin

تاريخ الميلاد : ١٩٩٣ سبتمبر ٢٧

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وحصل على  
درجة :

٥٠	فهم المسموع
٣٨	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٢	فهم المقرؤ
٤٠٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوگاكرتا، ١٠ أبريل ٢٠١٨

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

*Muhammad Nafiudin*

**Telah melaksanakan Praktek Pengembangan Masyarakat II  
di Program CSR PT Pertamina TBBM Rewulu,  
mulai dari 7 September 2017 s/d 20 Desember 2017,  
dengan hasil BAIK.**

Yogyakarta, 25 Desember 2017  
CDO Pertamina TBBM Rewulu

Zukhruf Arifin

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara Dengan Masyarakat Desa**



**Observasi di Kantor Balai Desa Jambangan**



**Wawancara Dengan BP Darto**



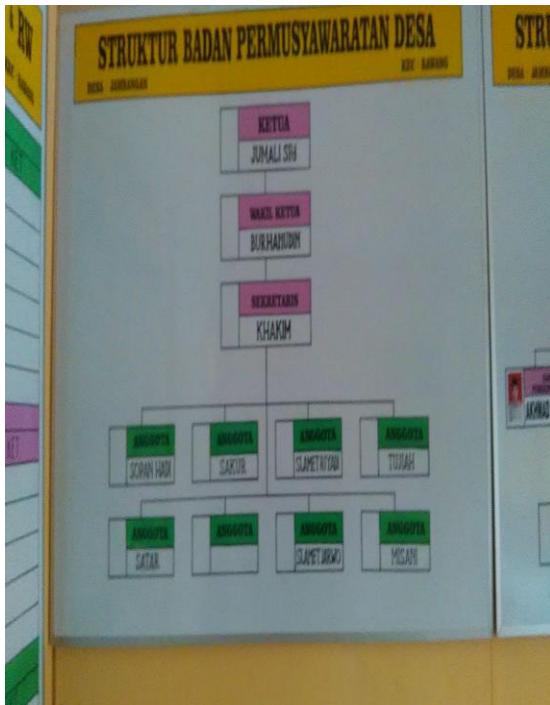
**Ruang Kerja Sekretaris Desa**



Wawancara Dengan ketua BPD



Kantor Balai Desa



Struktur BPD



Struktur Pemerintah Desa Jambangan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Nafiudin  
Tempat/Tgl. Lahir : Batang 27 September 1993  
Alamat : Dk. Jambangan Rt 06/Rw 01, Ds Jambangan, Kec Bawang, Kab. Batang, Jawa Tegah, Kode Pos 51274  
Fak/Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi/ Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
No HP : 089668493681  
Email : [bungnafix93@gmail.com](mailto:bungnafix93@gmail.com)

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### Pendidikan Formal

- a. MI Islamiyah Jambangan, 2006
- b. MTS Sunan Kalijaga, 2009
- c. SMK Muhammadiyah Bawang, 2012

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Wakil Ketua PMII Rayon Pondok Syahadat Fakultas Dakwah ( 2015-2016)
2. Bendahara Forum Silaturrahmi Mahasiswa Batang Yogyakarta (2014-2015)
3. Divsi Kemasyarakatan Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia ( 2017-2018)